

**STRATEGI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
SEKTOR PENGELUARAN PER KAPITA DI PROVINSI JAMBI**

***STRATEGY TO INCREASE THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX  
PERCAPITA EXPENDITURE SECTOR IN JAMBI PROVINCE***

**<sup>1</sup>Enny Andriany, <sup>2</sup>Asti Harkeni, <sup>3</sup>Susi Desmaryani**

<sup>1,2</sup>*Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi*  
email: <sup>1</sup>\*enny.andriany99@gmail.com

**ABSTRACT**

*The research objective is to map the achievement of the Human Development Index (HDI) from the per capita expenditure sector and strategies to accelerate the achievement of HDI in Jambi Province. The research method is a quantitative cross sectional design through in-depth interviews with respondents selected by purposive sampling in the districts / cities in Jambi Province and Focus Group Discussion (FGD). Respondents were selected from several districts / cities in Jambi Province for 8 months, namely March to October 2019. Secondary data were obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The determination of the development quadrant of the per capita expenditure sector in Jambi Province and the strategy to accelerate the increase in HDI were analyzed using the Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) analysis. The results showed that the HDI of Jambi Province in 2018 was 70.65%, an increase of 0.66 compared to the HDI in 2017 which was 69.69%, but still below the national HDI, which was 70.81. The HDI per capita expenditure sector of Jambi Province in 2018 was 10357, an increase compared to 2017, which was 9880. The results of the SWOT analysis showed that the economic capacity of the people of Jambi Province is currently in quadrant II, meaning that to increase per capita community expenditure, the Jambi Provincial Government must synergize with Districts / Cities are diversifying strategies by expanding employment opportunities and strengthening capital assistance for the community.*

**Keywords :** IPM; Income Index; Strategy Diversification; Jambi Province

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah memetakan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari sektor pengeluaran per kapita dan strategi dalam percepatan pencapaian IPM di Provinsi Jambi. Metode penelitian adalah kuantitatif desain *cross sectional* melalui wawancara mendalam dengan responden yang dipilih secara *purposive sampling* di Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi dan *Focus Group Discussion* (FGD). Responden dipilih dari beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama 8 bulan yaitu bulan Maret sampai Oktober tahun 2019. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penentuan kuadran pembangunan dari sektor pengeluaran per kapita di Provinsi Jambi dan strategi percepatan peningkatan IPM dianalisa menggunakan analisa *Strenght Weakness Opportunity Threat* (SWOT). Hasil penelitian diperoleh IPM Provinsi Jambi pada tahun 2018 yaitu 70,65 %, mengalami peningkatan 0,66 dibandingkan IPM pada tahun 2017 yaitu 69,69%, akan tetapi masih di bawah IPM nasional yaitu sebesar 70,81. IPM sektor pengeluaran per kapita Provinsi Jambi tahun 2018 yaitu 10357, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yaitu 9880. Hasil analisa SWOT diperoleh bahwa kemampuan ekonomi masyarakat Provinsi Jambi saat ini berada di kuadran II, artinya untuk meningkatkan pengeluaran perkapita masyarakat maka Pemerintah Provinsi Jambi harus bersinergi dengan Kabupaten/Kota melakukan diversifikasi strategi dengan memperluas lapangan pekerjaan dan memperkuat bantuan modal bagi masyarakat.

**Keywords :** IPM; Pengeluaran Per Kapita; Diversifikasi Strategi; Provinsi Jambi

## **PENDAHULUAN**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu tolak ukur capaian pembangunan nasional. Badan Pusat Statistik tahun 2015 mengukur IPM dengan metode baru meliputi dimensi/sektor pendidikan, kesehatan dan pengeluaran perkapita. Menurut Badan Pusat Statistik, IPM ditinjau dari sektor pendidikan yaitu pengetahuan, IPM sektor kesehatan yaitu umur panjang dan hidup sehat serta IPM ditinjau dari sektor pengeluaran perkapita yaitu standar hidup layak. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli.

Indeks daya beli yang mencerminkan kemampuan ekonomi digunakan untuk mengukur standar hidup manusia. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangga. Distribusi pengeluaran per kapita untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (daya beli). Ukuran kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan melalui pengeluaran.

Berdasarkan data BPS tahun 2018, IPM Provinsi Jambi pada tahun 2018 tumbuh sebesar 0,66 % dibandingkan IPM tahun 2017. Tahun 2017 IPM Provinsi Jambi sebesar 69,99, sementara angka IPM pada tahun 2018 sebesar 70,65, akan tetapi IPM Provinsi Jambi tahun 2018 masih di bawah rata-rata IPM nasional yaitu sebesar 70,81. Pertumbuhan IPM Provinsi Jambi tahun 2018 meningkat sebesar 0,94 persen dibandingkan tahun 2017. Tahun 2017 IPM sektor pengeluaran Provinsi Jambi 9880 dan tahun 2018 IPM sektor pengeluaran menjadi 10.357.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendukung peran Pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya percepatan peningkatan IPM sektor pengeluaran per kapita dengan memetakan peningkatan capaian IPM pada kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, dan menentukan strategi percepatan pencapaian IPM sektor pengeluaran per kapita di Provinsi Jambi.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian Ezkiriyanto (2013) menjelaskan bahwa variable penting yang menghubungkan IPM dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita

adalah rata-rata lama sekolah, belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan, total pengeluaran pemerintah dan distribusi pendapatan. Metode yang digunakan adalah metode *Two-Stage Least Square (2SLS)*. Penelitian Putra, (2013) menjelaskan adanya ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Jambi karena terjadinya perbedaan potensi yang dimiliki, diantaranya letak geografis, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan tentang kesenjangan pendapatan yang didukung oleh berbagai hasil penelitian maka dilakukan kajian tentang pengurangan ketimpangan pendapatan dalam menguatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi.

Hasil penelitian Yusuf dan Nurmala menjelaskan bahwa pendapatan perkapita, Investasi dan belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli. Hal ini berdasarkan IPM yaitu indeks standar hidup layak yang di proxy melalui indek pengeluaran, maka penelitian melihat faktor-faktor yang pengaruh indek standar hidup layak melalui pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kemiskinan dan pengangguran.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif desain *cross sectional*, di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi (11 kabupaten/kota) selama 8 bulan terhitung bulan Maret sampai Oktober tahun 2018. Sampel penelitian dipilih secara *Purposive Sampling* dengan kriteria sampel dapat mewakili dari data yang dibutuhkan, yaitu pejabat struktural pada lingkup Dinas Ekonomi dan Pembangunan di Kabupaten/Kota se-provinsi Jambi. Data terdiri dari data primer yang dikumpulkan melalui *Indepht interview* (wawancara mendalam) dan *Focus Group Discussion (FGD)* dan data sekunder bersumber dari BPS dan Susenas. Tingkat pencapaian IPM sektor pengeluaran per kapita Kabupaten/Kota dianalisis berdasarkan data sekunder, sedangkan penentuan kuadran pembangunan sektor pengeluaran per kapita di Provinsi Jambi dan strategi dalam upaya percepatan peningkatan indeks IPM dianalisis menggunakan analisis SWOT.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. HASIL

Nilai IPM yang digunakan untuk melihat IPM secara global adalah dengan menggunakan nilai IPM metode United Nations Development Programme (UNDP) dengan pengelompokan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. Very high HDI: untuk nilai IPM  $\geq 0.800$
- b. High HDI:  $0.700 \leq \text{nilai IPM} < 0.800$
- c. Medium HDI:  $0.550 \leq \text{nilai IPM} < 0.700$
- d. Low HDI: nilai IPM  $< 0.550$

Publikasi indikator IPM yang ditetapkan oleh UNDP kemudian digunakan pemerintah sebagai indikator capaian IPM di Indonesia. Untuk menghitung posisi IPM Kabupaten dan Kota, pemerintah menggunakan metode BPS<sup>(3)</sup>.

#### 1. Indeks Standar hidup (Indeks pengeluaran)

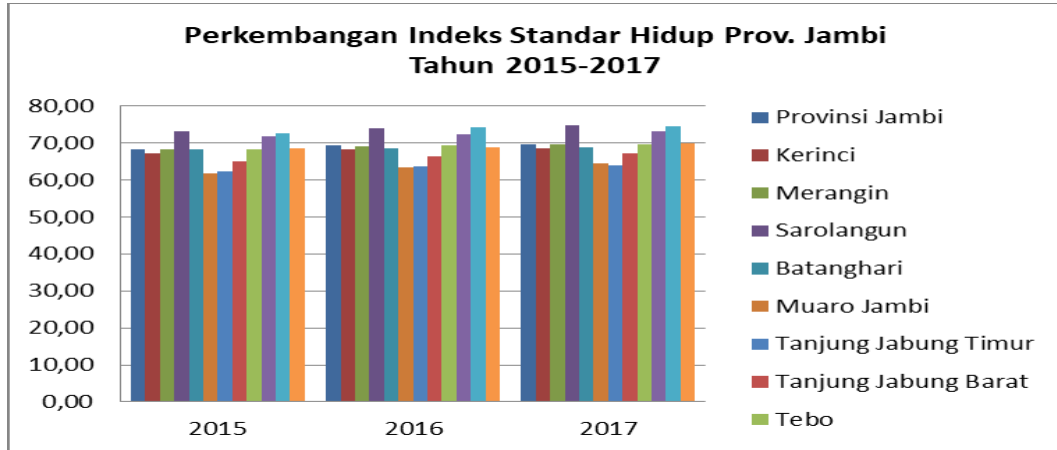
Seseorang dikatakan hidup layak apabila mampu memenuhi kebutuhan hidupnya pada kelompok makanan dan minuman, bahan bakar dan penerangan, perumahan dan peralatan, pakaian dan kelompok lainnya. Standar hidup layak menggambarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selama satu bulan yang di ukur dari besarnya pendapatan yang diterima. Menurut Sakti (2018)<sup>(8)</sup>, faktor penentu tingkat dan pertumbuhan masyarakat adalah pendapatan rumah tangga dan inflasi. Perkembangan variable pengamatan untuk indeks standar hidup menggunakan persamaan :

$$\text{Perkembangan variable pengamatan} = \frac{\text{Ta} - \text{Td}}{\text{Td}} \times 100\%$$

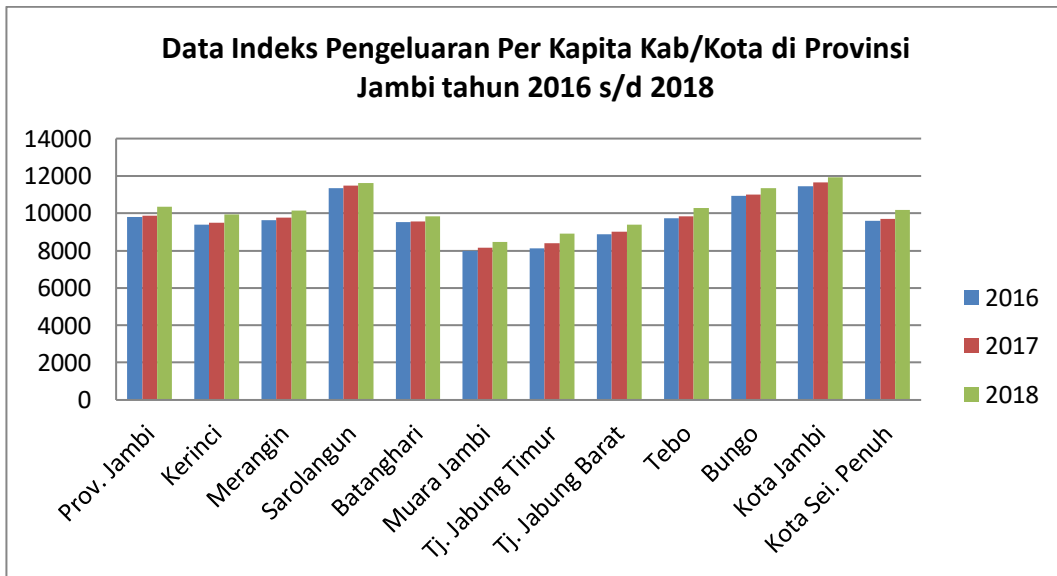
Ta adalah data tahun yang dianalisis, sedangkan Td adalah data tahun dasar.

Berdasarkan gambar 1 dan gambar 2 di bawah capaian perkembangan indeks pengeluaran per kapita (standar hidup) masyarakat Provinsi Jambi dari tahun 2015-2017 dapat dilihat pada gambar.1 dibawah ini. Berdasarkan gambar.1 capaian perkembangan indeks pengeluaran per kapita mengalami perkembangan yang positif, artinya bahwa Provinsi Jambi memiliki kemampuan membeli semakin besar dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Hal ini di iringi oleh meningkatnya pendapatan yang diterima. Capaian indeks pengeluaran Provinsi Jambi pada Tahun 2017 sebesar 69,5 % dengan kategori sedang yaitu

55% – 70,0 %. Ada 4 kabupaten/ kota yang memiliki pengeluaran konsumsi diatas capaian Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Pengeluaran Konsumsi terbesar terdapat di Kota Jambi yaitu 74,5% dan pengeluaran konsumsi terkecil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu 64, 1%.



Gambar 1. Data perkembangan indeks standar hidup Provinsi Jambi tahun 2015-2017 (sumber BPS)



Gambar 2. Data Indeks Pengeluaran per kapita Provinsi Jambi Tahun 2016-2018

## 2. Analisa SWOT

Analisis SWOT merupakan suatu metode yang menunjukkan kinerja perusahaan dengan menentukan kombinasi faktor internal dan eksternal. Analisa SWOT membandingkan antara faktor internal, yaitu kekuatan (*stregth*), dan

kelemahan (*weakness*) dengan faktor eksternal yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*). Tabel 2. berikut merupakan hasil pengumpulan data terhadap responden di Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Jambi, diperoleh :

Tabel 2. Internal Faktor Evaluation (IFE) pada aspek kemampuan ekonomi (pengeluaran per kapita) di Provinsi Jambi

No.	Kekuatan ( <i>Strenght</i> )	Bobot	Rating	Jumlah bobot
1.	Tersedianya lapangan kerja	0,10	2	0,20
2	Potensi daerah yang mendukung untuk berusaha (tumbuh UMKM)	0,11	3	0,33
3.	Program pengembangan pemberdayaan masyarakat	0,11	3	0,33
4.	Tersedianya bantuan modal usaha bagi masyarakat	0,10	2	0,20
5.	Penguatan kemitraan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan UMKM	0,12	3	0,36
<b>Total Kekuatan Pada Paktor Internal</b>				<b>1,42</b>
No	Kelemahan ( <i>Weakness</i> )	Bobot	Rating	Nilai Skor
1	Tingkat pengetahuan masyarakat	0,09	2	0,18
2	Ketrampilan masyarakat	0,08	2	0,16
3	Kemampuan tehnologi untuk pertanian	0,09	2	0,18
4	Karakter masyarakat dalam berusaha	0,09	2	0,18
5	Dukungan pemerintah meningkatkan kemampuan usaha masyarakat	0,11	3	0,33
<b>Total Kelemahan Pada Faktor internal</b>				<b>1,03</b>

(\* lanjutan table di atas) Peluang dan Selisih antara ancaman O - T =  $1,42 - 1,03 = 0,39$

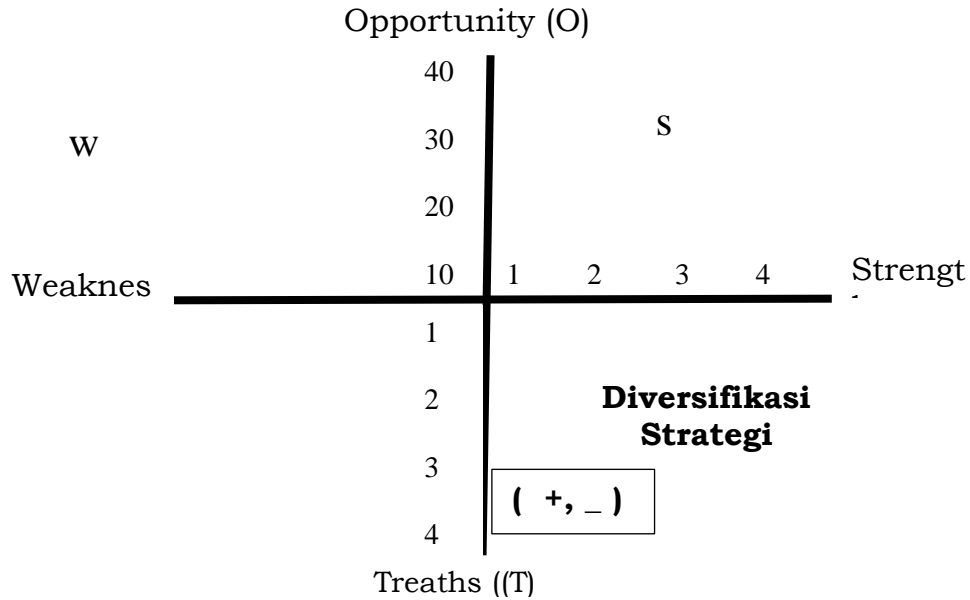
Tabel 3. Internal Faktor Evaluation (IFE) pada Kemampuan Ekonomi (pengeluaran per kapita) di Provinsi Jambi

No	Peluang ( <i>Opportunity</i> )	Bobot	Rating	Nilai Skor
1	Potensi pariwisata	0,12	3	0,36
2	Pemanfaatan lembaga keuangan	0,10	2	0,20
3	Pemanfaatan pola kemitraan	0,10	2	0,20
4	Pemanfaatan lahan kosong (tidur)	0,08	2	0,16
5	Pemanfaatan tehnologi untuk meningkatkan pengembangan usaha	0,10	2	0,20
Total Peluang Faktor Eksternal				1,12
NoNo.	Ancaman ( <i>Treath</i> )	Bobot	Rating	Nilai Skor
1	Tenaga kerja luar daerah yang lebih terampil	0,11	2	0,22
2	Ancaman inflasi	0,12	3	0,36
3	Jaringan Industri Reteil bermodal besar	0,11	3	0,33
4	Produk impor yang lebih murah	0,09	2	0,18
5	Petani dihadapkan pada kredit berbasis bunga	0,07	2	0,14
<b>Total Ancaman Faktor Eksternal</b>				<b>1,23</b>

Selisih antara peluang dan ancaman O - T =  $1,12 - 1,23 = -0,11$

Berdasarkan kondisi faktor internal pada tabel 2 dan faktor eksternal pada tabel 3 diperoleh hasil posisi kemampuan ekonomi Provinsi Jambi dari sisi pendapatan pada saat ini memiliki kekuatan dan peluang yang digambarkan pada

gambar 1. Hasil analisa SWOT di atas menjelaskan bahwa posisi Kemampuan Ekonomi masyarakat Provinsi Jambi saat ini berada di kuadran II seperti gambar 4 dibawah ini, artinya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maka Pemerintah Provinsi Jambi harus melakukan diversifikasi strategi.



Gambar 4. Diagram SWOT untuk strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi melalui peningkatan pendapatan

## B. Pembahasan

### 1. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten dan Kota Se- Provinsi Jambi

Data (BPS)<sup>(3)</sup> mencatat pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Tahun 2018 nilai IPM Indonesia mencapai 71,39 atau naik 0,58 poin dari tahun sebelumnya Kenaikan IPM disebabkan perbaikan angka harapan hidup, kualitas pendidikan serta daya beli masyarakat<sup>(8)</sup>. Pemerintah berusaha mengurangi berbagai ketimpangan yang muncul melalui perbaikan kualitas penduduk.

Pengukuran pendapatan masyarakat yang dilakukan oleh BPS tidak mudah, sehingga BPS melakukan perhitungan pendapatan dengan menggunakan pengeluaran/ konsumsi masyarakat yang sudah disesuaikan. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa bila pendapatan mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh berbagai kebutuhan yang semakin banyak sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi.

Tabel.3. Perkembangan pendapatan Perkapita Provinsi Jambi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi (Juta rupiah)

Wilayah	Tahun						Rata-rata
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Provinsi Jambi	9483805.8	10275857	10547313.9	11002307.1	11858827.1	12425344.6	10932242.6
Kerinci	4155505.9	4411405.9	4811384.4	5120000.4	5464047.7	5797185.2	7374801.1
Merangin	6649791.1	7078931.3	7583449.1	7992840.9	8489684.8	8948395.5	7.790515.5
Sarolangun	7663231.9	8246149.4	8675187.1	8986677.2	9369739.2	9782796.6	8.787.296.9
Batanghari	8118646	8644802.7	9298567.4	9695287.2	10146144.6	10634357.9	9422967.6
Muaro Jambi	10866516	11643599	9298567	9695287	13956192	14662153.9	11687052.5
Tanjung	14053622.3	14695728.8	15549496.8	15830521.6	16257802.4	16766263.6	15525572.6
Jabung Timur							
Tanjung	21822843.5	23073558	24551688.7	25446121.5	26245198.5	27421787.5	24760199.6
Jabung Barat							
Tebo	6729418	7242753	7881379	8298286	8744341	9236996	8022195.5
Bungo	8446776	9208466.7	9829560.7	10333808.1	10891038	11507950.1	10036266.6
Kota Jambi	12848141.3	12938735.3	15080229.5	15921206.1	16936442	17728338.7	15242182.2
Kota Sei. Penuh	29673620	3218243	3460943	3705362	3946467	4192565.2	35818236.7

Pendapatan perkapita di Provinsi Jambi rata-rata 6 (enam) tahun terakhir sebesar Rp 10.932.242,6 per jiwa. Sekitar 54,5 % kabupaten memiliki pengeluaran perkapita dibawah pengeluaran rata-rata Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo dan kabupaten bungo. Sekitar 45,5% Kabupaten memiliki pengeluaran perkapita diatas Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Rata-rata pendapatan perkapita paling tinggi terdapat di Kota Sungai Penuh dan pengeluaran perkapita paling rendah terdapat di Kabupaten Kerinci.

## 2. Strategi Peningkatan IPM Sektor Pengeluaran di Provinsi Jambi

Analisis SWOT dilakukan dengan mengukur kinerja program pemerintah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. Hasil analisa SWOT untuk strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi melalui peningkatan pendapatan terlihat di Gambar 4 :

1. Hasil analisa menggunakan analisa SWOT, posisinya kinerja pemerintah kabupaten/ kota di Provinsi Jambi berada di kaudran II.
2. Pada indeks Standar Hidup melalui peningkatan pendapatan menegaskan Provinsi Jambi memiliki kekuatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari sisi potensi daerah untuk tumbuhnya Usaha Kecil Mikro dan Menengah



- (UMKM), kekuatan pengembangan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemitraan.
3. Kekuatan yang harus diperhatikan adalah peningkatan lapangan pekerjaan dan memperkuat bantuan permodal bagi masyarakat atau pelaku usaha dengan mengembangkan potensi wisata yang memiliki peluang cukup baik.
  4. Beberapa Kabupaten di Provinsi Jambi seperti Kerinci, Merangin, Tanjung Jabung Barat memerlukan sinergisitas dengan stakeholder terkait dan bersama masyarakat membangun dan menggali potensi pariwisata dengan memperkuat kelembagaan antar masyarakat.
  5. Perluasan lapangan kerja dapat dilakukan dengan memperkuat dan mengembangkan hubungan kemitraan sehingga dapat menjamin adanya hilirisasi produk baik produk setengah jadi maupun produk jadi. Pemanfaatan lahan tidur juga merupakan solusi untuk memperluas lapangan kerja. Untuk itu diperlukan program desa yang mampu mengikat dan memotivasi pemuda-pemuda untuk aktif membangun desa. Untuk memperoleh peluang-peluang tersebut maka kabupaten/ Kota Se- Provinsi Jambi harus mempersiapkan program-program yang mampu memberikan peluang kepada masyarakat diantaranya memperkuat pengetahuan masyarakat untuk melakukan pengembangan usaha dalam bentuk diversifikasi produk. Untuk menjangkau hal tersebut diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mengembangkan potensi usaha melalui penguatan SDM.

## **KESIMPULAN**

Tingkat Kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi dari aspek kemampuan ekonomi sudah cukup tinggi. Akan tetapi masih ada 4 (empat) Kabupaten yang masih memiliki pertumbuhan ekonomi rendah yaitu Sarolangun, Batanghari, Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Pendapatan per kapita Provinsi Jambi rata-rata masih rendah, hanya 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang memiliki pendapatan per kapita tinggi yaitu Merangin, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi cukup rendah dan 4 daerah memiliki tingkat pengangguran terbuka tinggi yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. Indeks Pembangunan Manusia. 2015 [Internet]. Jakarta; 2016. Available from: <https://www.bps.go.id/publication/2016/10/17/043d29f04b2adadb7063fb5a/indeks-pembangunan-manusia-2015.html>
- BPS. IPM Badan Pusat Statistik [Internet]. Jakarta; 2015. Available from: <https://ipm.bps.go.id/page/ipm>
- BPS. Berita Resmi Statistik [Internet]. 026/5/15/T. Jakarta; 2019. 1 p. Available from: [jambi.bps.go.id%3Epressrealase](http://jambi.bps.go.id%3Epressrealase)
- Ezkirianto R. Analisis keterkaitan antara Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB per kapita di Indonesia. *J Ekon dan Kebijakan Pembang* [Internet]. 2018;2:1. Available from: <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jekp/article/view/19949>
- Putra A. Analisis Determinan Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jambi pada Periode Tahun 2008 – 2013. *Jurnal Depelovment* ,ISSN 2338-67-46. 2013;
- Yusuf, Ahmad. Nurmalah S. Pengaruh Pendapatan Perkapita, Investasi, dan Belanja Pemerintah terhadap Daya Beli Masyarakat di Wilayah III Cirebon Tahun 2010-2014.